

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam studi hubungan internasional kontemporer, terdapat beberapa perubahan besar yang sedang dialami oleh berbagai negara di belahan dunia yang memiliki implikasi pada politik global. Dengan fokus pada lingkungan global, para analis mengidentifikasi bahwa perubahan ini akan menciptakan sebuah tren baru yang secara bertahap membentuk pola tatanan dunia baru dan hubungan antar-negara dan intra-negara di dunia (Steffen, 2011). Seperti yang tengah dialami beberapa waktu ini, dunia sempat menghadapi kekosongan kekuasaan, sehingga beberapa pusat kekuasaan baru telah muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran kekuasaan antar negara, dari Barat ke Timur dan *diffusion of power* di tatanan dunia. Secara geostrategis, transisi ini dipimpin oleh negara-negara Asia termasuk China, Jepang, Korea Selatan, India, dan beberapa negara lainnya. Sejak berakhirnya perang dingin hingga serangan teroris 9/11 dan krisis keuangan dunia, tatanan dunia mengalami perubahan yang sangat drastis. Dominasi Amerika Serikat (AS) dan kekuatan Barat pun semakin berkurang. Sebaliknya, status dan peran negara-negara berkembang lainnya mengalami peningkatan secara signifikan. Bagi banyak negara Asia, terutama China, dua dekade terakhir merupakan periode evolusi dan kebangkitan. Dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang muncul, China sedang menjalani proses penyesuaian kembali dalam sistem global dengan relatif menurunnya kekuatan AS (Kappel, 2015).

Situasi ini menciptakan *déjà vu* bagi AS, meninjau kembali pada saat perang dingin bahwa Uni Soviet merupakan negara yang bersanding dengan AS di tengah kontestasi dalam memperebutkan tahta sebagai negara hegemoni. Namun China memiliki perbedaan kontras dengan Uni Soviet, China tidak hanya menjadi kekuatan militer yang kuat didirikan di atas ekonomi yang lemah, melainkan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan kekuatan militer yang kredibel (Bernstein & Munro, 1997). AS tidak boleh puas dengan kemenangannya di perang dingin, walaupun AS memiliki pertumbuhan ekonomi yang optimum di tahun yang akan datang namun dengan pengaruh global serta kemampuannya tidaklah cukup untuk bisa mempertahankan posisinya karena faktanya bahwa negara-negara besar lainnya akan terus berkembang dan menjadi lebih percaya diri untuk menunjukkan kekuatannya di sistem internasional.

Dengan berakhirnya perang dingin, keinginan negara menjadi *Great Power* tidak serta-merta akan menghilang, kecuali ada negara yang mampu terlegitimasi menjadi hegemoni global (Ikenberry & Mearsheimer, 2001). Namun, pada kenyataannya bagaimanapun tidak ada negara yang mampu mencapai hegemoni global secara utuh karena dunia ditakdirkan untuk persaingan kekuatan yang terus-menerus akan terjadi. Fenomena rivalitas yang terjadi di abad ini melibatkan dua *great power* yang memperjuangkan kepentingannya di sistem internasional melalui orientasi kebijakan luar negerinya. Rivalitas AS dan China akan menjadi isu regional terpenting di abad ini, menengok bahwa dampak yang diberikan akibat gesekan politik antara dua negara *preminent* yakni AS yang berpredikat sebagai *delegitimized world power* dan China yang berpredikat sebagai *challenger* (Suhito, 2018).

Disamping itu, peningkatan pengaruh China di kawasan khususnya Asia Pasifik kini semakin tak terelakkan dengan kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI). Kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan pengaruh ekonomi dan politik di kawasan Indo-Pasifik dan juga untuk memperluas klaim wilayah yang memicu sengketa wilayah dengan banyak negara tetangga (Y. Park, 2021). China menjadi pusat gravitasi baru di kawasan menjadi sebuah kondisi yang harus dihadapi oleh AS. Pengaruh China di kawasan semakin sangat kuat akibat ambisi yang didukung oleh kekuatan ekonomi, sehingga upaya kebijakan AS dalam *rebalancing* akan semakin sulit (Al Syahrin, 2018a). Seiring meningkatnya kontestasi yang terjadi diantara kedua negara tersebut membuat ketidakpastian situasi dan perpolitikan global khususnya di kawasan.

Asia Timur menjadi salah satu kawasan yang terpengaruh oleh ketidakstabilan sistem internasional yang terjadi akibat persaingan dua *great power*. Terdapat banyak konfrontasi yang terjadi di kawasan tersebut yang membuat kompleksitas keamanan di kawasan sangat tidak kondusif (Al Syahrin, 2018b). Dinamika keamanan regional Asia Timur berkulat di tiga permasalahan yakni : Buruknya hubungan Jepang dengan negara kawasan akibat historis, ketegangan yang terjadi diantara China dan Taiwan, dan perang yang tak kunjung terselesaikan di Semenanjung Korea (Buzan & Waeber, 2003). Ketegangan yang terjadi di kawasan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak eksternal, yakni AS, dalam aliansi pertahanan dengan Jepang dan Korea Selatan di kawasan Asia Timur. Kompleksitas yang terjadi diantara negara di kawasan Asia Timur selalu diwarnai oleh persaingan dalam perimbangan kekuatan, aliansi keamanan, serta masuknya kekuatan eksternal (Buzan & Waeber, 2003). Rivalitas yang terjadi diantara AS dan

China membuat kawasan Asia Timur diwarnai dengan perebutan pengaruh kekuasaan regional dan memungkinkan untuk terjadinya benturan kepentingan yang dapat memicu terjadinya konflik dan ketidakstabilan kawasan Asia Timur.

Dengan persaingan yang begitu ketat diantara AS dan China, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Terkhususnya Korea Selatan harus menghadapi pengaruh langsung dari kedua negara adidaya tersebut dengan menyusun sebuah kebijakan yang lebih sesuai. Persaingan sengit antara kedua negara *preminent* dapat menjadi ancaman yang sangat serius bagi Korea Selatan. Hal tersebut dikarenakan Korea Selatan memiliki kerja sama keamanan dan ekonomi dengan kedua negara tersebut secara bersamaan. Korea Selatan juga memiliki kontak geografis dengan China dan berada di *balance point* diantara komunis dan demokrasi liberal. Ditengah *Strategy Partnerships with China* dan *Alliance with America* tidak mudah bagi Korea Selatan untuk membuat pilihan kebijakan dan strategi yang tepat terhadap kedua negara tersebut (E. Kim & Cha, 2016).

Rivalitas yang terjadi antara China dan AS mempengaruhi hubungan antara Washington dan Seoul yang mana kedua negara tersebut sudah berkomitmen untuk beraliansi semenjak 1950 akibat agresi Korea Utara. Hubungan antar kedua negara tersebut terjalin resmi sejak tahun 1954 setelah dilakukannya perjanjian *Mutual Defense Treaty*. AS menjadi mitra operasi komando pasukan gabungan Korea Selatan dan bertanggung jawab untuk merencanakan pembelaan terhadap Korea Selatan. Kerja sama AS dan Korea Selatan berupa penyediaan alat-alat militer, alih teknologi militer, penempatan pasukan dan pelatihan militer bersama di Semenanjung Korea (Itsnaini, 2016). Disamping itu China memiliki kedekatan dan konvergensi ekonomi serta memainkan peran mediasi dalam mengatasi ancaman

dari Korea Utara. Posisi Korea Selatan ditengah kedua negara *great power* menjadi sangat mengkhawatirkan di masa depan.

Namun pada masa pemerintahan presiden Park Geun Hye tahun 2017, Korea Selatan mengalami konflik yang tidak dapat terhindarkan akibat strategi diplomasi yang diambil oleh rezim pemerintahan Park Geun Hye. Strategi yang diambil dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak serta menghindari risiko atau kerugian oleh satu pihak (Ryeon, 2004). Presiden Park Geun Hye memiliki karakteristik kebijakan luar negeri untuk mempertahankan hubungan luar negeri AS dan China. Dalam hubungannya dengan China, Presiden Park menerima semua usulan yang diajukan oleh China seperti memasuki *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang dipimpin langsung oleh China. China mendirikan AIIB sebagai upaya untuk merespon IMF, ADB, dan WB yang merupakan bentuk kepentingan Barat. Korea Selatan bergabung sebagai pemegang saham terbesar kelima, sehingga dapat meningkatkan statusnya di sistem internasional. Selain itu, hubungan bisnis antara Korea Selatan dan China juga semakin mengalami keuntungan ekonomi yang didapat akibat dari manfaat *silk road* yang dibuat melalui dana yang digelontorkan oleh AIIB. Korea Selatan dan China juga bekerjasama menjadi mitra dagang untuk meningkatkan hubungan bisnis diantara kedua negara tersebut dengan ditandatanganinya *Free Trade Agreement* (FTA) pada bulan Desember 2015 (Paramitha et al., 2021).

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, terdapat sebuah fenomena yang memperlihatkan kedekatan kedua negara dalam bidang keamanan yakni Presiden Park Geun Hye terlihat menghadiri upacara ke-70 hari kemenangan perang di China yang menjadikan Park Geun Hye sebagai presiden Korea Selatan yang

berpartisipasi dalam upacara tradisional yang diadakan oleh China. Korea Selatan sering dianggap memiliki kedekatan dengan AS namun lewat fenomena tersebut Korea Selatan terlihat berusaha membangun hubungan baik dengan China. Hal tersebut dikarenakan China memiliki kekuatan dan pengaruh untuk menghentikan persenjataan nuklir Korea Utara sebagai negara sekutunya meskipun kebijakan tersebut tidak disetujui oleh aliansinya AS. Strategi yang dilakukan pada masa rezim pemerintahan Park Geun Hye dapat dipahami untuk mendapatkan *exposure* untuk meningkatkan ekonomi melalui kerja sama yang dilakukan dengan China walaupun Korea Selatan harus mempertaruhkan aliansinya dengan AS (Jin, 2016).

Untuk mempertahankan hubungan aliansinya dengan AS, Korea Selatan akhirnya menyetujui pembangunan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) pada masa pemerintahan Park Geun Hye. THAAD merupakan elemen *Ballistic Missile Defense System* (BDMS) dengan kemampuan mencegah dan menghancurkan misil balistik baik di dalam atmosfer maupun di luar atmosfer. Tujuan utama dalam penempatan THAAD di Korea Selatan adalah untuk melindungi Seoul dan tentara AS yang berada di Korea Selatan dari kemungkinan terjadinya eskalasi serangan langsung misil dari Korea Utara. Yang menjadi polemik adalah pemerintah China menentang adanya penempatan THAAD karena dianggap akan dapat menjadi ancaman bagi negaranya dan akan menjadi masalah keamanan bagi negaranya. Hal tersebut ditandai ketika Duta Besar China di Seoul, Qiuc Guohong telah menyatakan di *Korean National Assembly* bahwa China jelas menentang instalasi THAAD di semenanjung yang mana akan berdampak tidak baik pada hubungan Korea Selatan dengan China (Rinehart et al., 2015).

Pemerintah China beranggapan bahwa THAAD akan menyabotase keseimbangan keamanan regional dan akan meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea (Xiyu, 2016). Penempatan THAAD di Korea Selatan yang awalnya digunakan sebagai jaminan keamanan dari rudal, ditakutkan akan membuat isu ini semakin memanas karena China merasa tempat pemasangan THAAD sangat dekat dengan perbatasan China. Hal ini yang membuat timbulnya konflik antara Korea Selatan dengan China. Selain itu, China merasa curiga dengan keputusan secara sepihak Korea Selatan dalam membangun THAAD yang dilakukan oleh Korea Selatan dan AS. Kecurigaan ini tentunya disebabkan karena China menganggap bahwa AS merupakan lawan potensialnya (Bramantya, 2019).

Adanya persaingan antara China dengan AS juga membuat konflik yang terjadi semakin memanas. Menurut Mearsheimer, China ingin mendominasi kawasan Asia seperti halnya AS yang mendominasi (Mearsheimer, 2006). China akan memaksimalkan *power gap* antara negaranya dengan negara tetangga baik dalam sektor militer dan juga ekonomi, dan China juga ingin menjadi negara yang ditakuti sehingga tidak ada lagi negara-negara lain yang dapat mengancam China. Dapat dikatakan, hal yang dilakukan China ini sebagai upaya untuk menyaingi peran AS di kawasan Asia dan ingin menjadi negara yang berpengaruh di Asia. Dengan adanya kerjasama THAAD ini, penulis berpendapat bahwa kerjasama antara AS dan Korea Selatan ini dapat mengganggu perkembangan China untuk menjadi negara yang hegemon di kawasan Asia.

Adanya peran AS dalam pemasangan THAAD di Korea Selatan juga ditakutkan akan membuat situasi antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi lebih tegang. Adanya kerjasama antara Korea Selatan dan AS dalam pemasangan

THAAD ini menimbulkan situasi panas bagi negara-negara di sekitarnya, dan salah satunya adalah China. Penguatan keamanan yang dilakukan Korea Selatan bisa saja menyinggung negara lain dan akan dibalas juga dengan meningkatkan keamanan oleh negara lain dan akan menimbulkan keresahan. Seperti China yang menganggap THAAD sebagai ancaman bagi negaranya (Jin, 2016).

Tindakan China yang menolak adanya penempatan THAAD di Korea Selatan membuat hubungan kedua negara tersebut menjadi tidak baik. China yang merasa bahwa THAAD merupakan sebuah ancaman di kawasan Asia Timur menolak adanya pemasangan THAAD. Hal ini berdampak pada hubungan kedua negara dan dapat terlihat dari sikap China terhadap Korea Selatan. Untuk merespon rencana pemasangan THAAD ini China memprotes dengan cara tidak menghadiri acara Hari Nasional Korea Selatan padahal China diundang sebagai tamu utama, China tidak mengizinkan adanya konten budaya Korea Selatan di negaranya, dan memberatkan segala bisnis dari perusahaan asal Korea Selatan khususnya Lotte yang menyediakan tanah untuk penempatan THAAD serta melarang penjualan paket pariwisata berkelompok ke Korea Selatan (KBS WORLD, 2017).

Dampaknya adalah penurunan jumlah wisatawan China ke Korea hampir menginjak angka 20%-40% di akhir tahun 2017, ditutupnya 75 Lotte Mart yang ada di China (Qonita & Hanura, 2019). Tindakan China ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan karena total sebanyak 80% ekspor material semi-jadi Korea Selatan bertujuan kepada China. Korea Selatan yang menggunakan *soft power* dalam diplomasinya untuk meningkatkan perekonomian negaranya dapat terhambat karena China melarang adanya konten budaya asal Korea Selatan berkembang di China padahal China merupakan *market* besar dalam tren budaya

Korea Selatan. Selain itu, perusahaan Korea Selatan juga di persulit untuk melakukan bisnis di China.

Perdagangan Korea Selatan yang bergantung pada China, mengalami kesulitan karena adanya isu THAAD ini. Namun bergabungnya Korea Selatan dengan AIIB dan menghadiri upacara militer di China, China mendukung akan kebijakan tersebut walaupun AS menentanginya. Hal ini menciptakan sebuah dilema bagi Korea Selatan karena kedua negara memiliki peran yang sangat penting bagi ekonomi dan keamanan. Korea Selatan merupakan negara *middle power* yang diapit oleh kedua negara *great power* sehingga kebijakan di bawah administrasi Presiden Park Geun Hye dalam mempertahankan hubungan dengan kedua negara tersebut dapat dipahami. Hanya saja kebijakan tersebut menjadi bumerang bagi negaranya melihat dari penurunan ekonomi yang terjadi, karena China merasakan *sense of insecurity* akibat isu THAAD dan menggunakan *economic dominance* sebagai bentuk penekanan (Tias, 2021).

Lalu di tahun 2017, rencana pemasangan THAAD ini di pemerintahan Moon Jae In akan dipertimbangkan kembali, sehingga hubungan dengan China pun menjadi balik ke titik normal. Namun, Moon Jae In menyadari bahwa pemasangan THAAD mungkin tidak bisa dihindari suatu saat di masa depan ketika memang dibutuhkan demi kepentingan nasional (Diaz & Zhang, 2017). Sehingga Moon Jae In menanggukkan pemasangan THAAD, namun apabila situasi mendorong Korea Selatan untuk memiliki pertahanan nuklir, maka tidak menutup kemungkinan THAAD akan dipasang kembali. Untuk mengimbangi risiko yang dimiliki, Presiden Moon Jae In mulai merintis sikap independen bagi negaranya. Salah satunya yakni dengan memperkuat otonomi pertahanan negara yang mana pada

tahun 2021 anggaran pertahanan dinaikkan sebesar 5,5% (US\$44 Miliar) yang menjadi rekor anggaran pertahanan tertinggi dalam dekade terakhir (Richey, 2020).

Pada Maret 2017 kepemimpinan Presiden Park Geun Hye diakhiri dengan hubungan politik yang kurang baik dengan China. Presidensi Korea Selatan pada tahun 2017 disambung oleh era pemerintahan Moon Jae In. Sejak awal pemerintahan, Moon Jae In berusaha menavigasi prioritas kebijakan yang terkadang bersaing untuk mempertahankan hubungan aliansi dengan AS dan menghindari ketegangan atau konflik yang lebih eksplisit dengan China. Era pemerintahan Moon Jae In dinilai berhasil secara luas, hal tersebut dimungkinkan akibat pengadopsian *strategic ambiguity* di tengah dua *major power*. Dengan itu Korea Selatan berhasil menunjukkan kemampuan dan dinamisannya sebagai *middle power* dengan strategi inovatifnya (Nilsson-Wright & Jie, 2021).

Selain itu Pemerintahan Moon Jae In mendorong hubungan yang lebih erat dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan merangkul kerja sama multilateral yang lebih luas melalui *Northeast Asia Cooperation Initiative for Infectious Disease Control and Public Health* yaitu program yang diumumkan oleh Moon Jae In pada saat pidatonya di UN *General Assembly* pada September 2020. Kebijakan multilateralisme ini meningkatkan persaingan kompetitif pada tingkat regional seperti Jepang yang memiliki inisiasi serupa. Tetapi, Presiden Moon Jae In memanfaatkan fenomena yang ada melalui *strategic entrepreneurship* dan kebijakan luar negeri yang khas dari pemerintahan Korea Selatan (Jaehyon Lee, 2020). Korea Selatan memiliki strategi kebijakan luar negeri baru di bawah pemerintahan Moon Jae In dalam mengimbangi rivalitas antara dua negara *preminent* dengan menggunakan strategi *hedging* yakni *The New Southern Policy*

yang diluncurkan pada tahun 2017 sebagai upaya untuk melepaskan diri dari jeratan kekuatan yang mendominasi di kawasan Asia Timur.

Penulis tertarik untuk membahas tema ini karena penyebab dari kemunculan *New Southern Policy* ini merupakan dinamika politik yang terjadi akibat keamanan dan ekonomi Korea Selatan baik secara domestik maupun kawasan. Korea Selatan yang berada di kawasan yang dipenuhi oleh tunggangan kepentingan negara-negara besar seperti AS, China dan Rusia telah membuat pemerintah sering berada dalam situasi dilematis. Ketidakstabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur ini yang kemudian membuat pemerintah Korea Selatan di era Moon Jae In berpikir dua kali untuk memprioritaskan kerjasama di kawasan.

Dilema keamanan yang dialami Korea Selatan menjadi landasan dari pemerintahan Moon Jae In untuk menemukan sebuah kebijakan yang seimbang dan halus untuk bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat dan China tanpa harus menaruh risiko di dalamnya. Sehingga kebijakan yang diinisiasi oleh Moon Jae In melalui *New Southern Policy* dapat dikatakan sebuah reaksi yang rasional bagi sebuah negara untuk menghadapi perkembangan geopolitik yang kompleks di kawasan. Sehingga penulis tertarik untuk membahas topik ini karena ingin mengetahui sejauh mana *durability* Korea Selatan dapat bertahan ditengah situasi rivalitas *great power*. Terlebih penelitian mengenai kebijakan luar negeri Korea Selatan yang berfokus pada kebijakan *The New Southern Policy* masih minim ditemukan. Selain itu penelitian ini signifikan untuk diteliti karena memiliki relevansi dengan studi hubungan internasional yang menarik untuk dibahas.

Berdasarkan pada paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Korea Selatan mengambil langkah strategis sebagai

negara *middle power* di tengah dua negara yang memiliki hubungan yang sama-sama kuat bagi negaranya. Yang mana orientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui *The New Southern Policy* akan diukur dan dijawab melalui strategi *hedging*. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Analisis Kebijakan *The New Southern Policy* sebagai Strategi *Hedging* Korea Selatan dalam merespons rivalitas Amerika Serikat – China pada Era Pemerintahan Moon Jae In.**

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana kebijakan luar negeri Korea Selatan melalui *The New Southern Policy* sebagai strategi *hedging* dalam merespons rivalitas Amerika Serikat – China?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, penelitian ini akan dibatasi pada aspek variabel yang diteliti yaitu pada era pemerintahan Moon Jae In. Penelitian ini akan mengkaji strategi Korea Selatan dalam menghadapi persaingan ketat antara Amerika Serikat dan China. Karena pesatnya pertumbuhan ekonomi China sejak awal abad ke-21, dinamika politik antara tiga negara yaitu Korea Selatan, Amerika Serikat, dan China mengalami hubungan geopolitik yang kompleks. Maka, penelitian ini akan berfokus untuk membahas dan menganalisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan melalui *The New Southern Policy* sebagai strategi *hedging* dalam rivalitas yang terjadi diantara Amerika Serikat dan China.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk mengetahui implikasi dari dinamika hubungan Korea Selatan dengan AS-China di tengah rivalitas kedua negara tersebut.
2. Untuk mengetahui dampak dari pembangunan THAAD dalam dinamika hubungan Korea Selatan, AS, dan China.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk strategi *hedging* yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam merespons rivalitas Amerika Serikat dan China.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah:

1. Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai bagaimana Korea Selatan bertahan di kondisi ambiguitas yang terjadi akibat rivalitas AS-China melalui orientasi kebijakan luar negerinya menggunakan strategi *hedging*.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memenuhi prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam dan memenuhi syarat kelulusan telah menempuh jenjang studi S-1 melalui pembuatan karya tulis ilmiah di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan;

- b. Diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademik dan aplikatif secara umum bagi akademisi maupun masyarakat secara umum, dan bagi penulis secara khusus;
- c. Diharapkan dapat membantu untuk menambah informasi kepada civitas akademika secara khusus yang berminat untuk meneliti permasalahan yang diangkat dan menjadi referensi bagi pihak yang berminat untuk melanjutkan tema penelitian ini.